



RENJA (RENCANA KERJA) BIRO HUKUM TAHUN 2025

**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat-Nya, kami bisa menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai kerangka acuan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, dan Biro Hukum pada khususnya. Hal mana Renja ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran selama 1 (satu) tahun ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Renja ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya Renja ini, dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya yang saling mendukung untuk perbaikan dan perubahan yang lebih baik lagi nantinya.

Semoga Renja ini memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan, baik dari unsur aparatur pemerintah yang terkait, maupun masyarakat sebagai mitra kerja, serta bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, Juni 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023.....	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	41
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	42
3.3. Program dan Kegiatan tahun 2025.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	48
4.1. Rencana Kerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025	
4.2. Pendanaan	
BAB V PENUTUP	64
5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	
5.2. Rencana Tindak Lanjut	
<u>LAMPIRAN TABEL</u>	
T-C.29.	17
T-C.30.	26
T-C.31.	36
T-C.32.	40
T-C.33.	45
Rekapitulasi SIPD-RI Tahun 2025	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) terus berkembang, dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas, dan demokratis.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Biro Hukum menyusun rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja tahun 2025 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2023 dengan tambahan ataupun perubahan nama kegiatan serta beberapa sub-sub kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, meliputi : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dalam kerangka acuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan.

b. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, dan sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1), huruf (d) dinyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup : penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Tahapan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :

- i. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah.
Anggota tim penyusun Renja Perangkat Daerah adalah pejabat dan staf Perangkat Daerah yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
 - Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing Perangkat Daerah, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di Perangkat Daerah. Tim penyusun dibuat sesederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.
- ii. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah.
Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja Perangkat Daerah, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
- iii. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja Perangkat Daerah sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang merinci

setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja Perangkat Daerah. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

iv. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

- Pengumpulan Data dan Informasi.

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah.

- Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut :

- Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.
- Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

- Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, antara lain:

- Peraturan perundang-undangan terkait.
- Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
- Dokumen-dokumen.
- Dokumen-dokumen RKPD.
- Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
- Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.

- Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.
- Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
- Data khusus lainnya dari setiap Perangkat Daerah yang dibutuhkan.

c. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud, diperlukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah sebagaimana dimaksud, dikoordinasikan oleh Menteri dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan, yaitu RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 (tiga) kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, rencana jangka menengah 5 (lima) tahun, dan rencana jangka pendek 1 (satu) tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

d. Tindak Lanjut Proses Penyusunan RAPBD

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif,

prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan berbagai pembiayaan pembangunan yang berasal dari APBN maupun APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor

8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;.

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
15. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-336-2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 489-70-2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Biro Hukum pada tahun 2025. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan yang berkaitan dengan aspek hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

□ Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya :

1. Realisasi program/kegiatan **yang tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan **yang telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun IKK sesuai dengan PP 6/2008 dan PP 38/2007
- Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
- Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada NSPK, SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
- **Permasalahan dan hambatan** yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan provinsi, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah **Formulasi isu-isu penting** berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarnya berbeda.
- Catatan penting juga diarahkan terhadap **kemungkinan perubahan aau penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja Perangkat Daerah** (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kab/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan)
- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:
 - a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun urusan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal:
 - ✓ Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun

- ✓ Pencapaian SDGs
- ✓ Pengentasan kemiskinan
- ✓ Pencapaian NSPK dan SPM
- ✓ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
- ✓ Pengembangan daerah terisolir
- ✓ dst
- ❑ Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - ✓ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan Daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V : Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

- ❑ Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- ❑ Kaidah-kaidah pelaksanaan
- ❑ Rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, serta untuk memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2025, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2023 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Kerja Biro Hukum tahun 2023 adalah melaksanakan program secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan dukungan dana, baik dari APBD maupun dari sumber lainnya yang sah. Dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 1 (satu) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 18 (delapan belas) sub kegiatan pada belanja rutin/penunjang urusan, serta 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan, dan 6 (enam) sub kegiatan pada belanja urusan, dengan total 2 program, 10 kegiatan, dan 24 sub kegiatan di tahun 2023.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja Biro Hukum telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing - masing kegiatan cukup tinggi, dimana rata - rata tingkat capaian masing - masing indikator di atas 90% walaupun hasil yang diharapkan belum optimal namun sasaran yang diharapkan sudah tercapai dan terlaksana dengan baik.

Capaian kinerja indikator **hasil (outcomes)** dapat digambarkan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah = 99,17%
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD = 99,26%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN = 100%
 - 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD = 100%
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD = 96,55%
 - 3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD = 100%
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan = 100%
 - 4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan = 99,81%
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor = 100%
 - 5.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor = 99,51%
 - 5.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan = 100%
 - 5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan = 98,26%
 - 5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD = 91,35%
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya = 98,34%
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat = 99,83%
 - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik = 98,61%
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan = 97,62%
 - 8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya = 97,22%

II. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

9. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

- 9.1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan = 90,20%
- 9.2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan = 83,52%
- 9.3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya = 88,35%
- 9.4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota = 99,80%

10. Fasilitasi Bantuan Hukum

- 10.1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum = 75,12%
- 10.2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM = 98,71%

dengan jumlah dukungan dana awal sebesar **Rp. 2.537.361.996,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)**, dan pagu anggaran terakhir pada perubahan APBD tahun 2023 sebesar **Rp.2.031.206.453,- (Dua Milyar Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)** dengan tingkat capaian kinerja (target) sebesar **100%**.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, diperlukan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja dengan cara pengukuran kinerja dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diarahkan pada indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, dan sasaran kinerja program, kegiatan maupun sub kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja dapat dilihat pada tabel T-C. 29 berikut :

TABEL T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023 S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
4.01.01.1.01.01	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	8 dokumen	8 dokumen	100%
4.01.01.1.01.02	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	-	-	-
4.01.01.1.01.03	c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.01.04	d Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.01.05	e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
4.01.01.1.01.06	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	6 dokumen	6 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100,00%	9 laporan	9 laporan	100%
4.01.01.1.01.07	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun (Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	9 dokumen	9 dokumen	-	-	-	6 Laporan	6 Laporan	100%

Renja Biro Hukum Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
4 01 01 1.02 02	a Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	8 orang	7 orang	5 orang	5 orang	100,00%	10 orang	10 orang	100%
4 01 01 1.02 03	b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	22 Dokumen	22 Dokumen	100%
4 01 01 1.02 05	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
4 01 01 1.02 07	d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan (Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD)	17 laporan	17 laporan	18 laporan	18 laporan	100,00%	18 laporan	18 laporan	100%
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
4 01 01 1.03 01	a Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-	-	-	-
4 01 01 1.03 02	b Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan (Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD)	2 Unit	2 Unit	3 Unit	2 Unit	100,00%	2 Unit/Dokumen	2 Unit/Dokumen	100%

Renja Biro Hukum Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)	
4 01 01 1.03 04	c	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya (Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD)	-	-	-	-	-	6 Laporan	6 Laporan	100%
4 01 01 1.03 05	d	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	-	-
4 01 01 1.03 06	e	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD; Jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	-	-	2 Dokumen; 4 Dokumen	2 Dokumen; 4 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti bimtek	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
4 01 01 1.05 02	a	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	4 Kali	1 Kali	100,00%	5 kali	5 kali	100%
4 01 01 1.05 04	b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi/bimtek (Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan)	7 Orang	6 Orang	5 Orang	5 Orang	100,00%	13 Orang	13 Orang	100%
4 01 01 1.05 09	c	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	30 Orang	30 Orang	100%

Renja Biro Hukum Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
4 01 01 1.06 02	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan; Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan)	-	-	13 Unit	13 Unit	100,00%	10 Unit/ Paket	10 Unit/ Paket	100%
4 01 01 1.06 03	b Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan)	5 Unit	5 Unit	-	-	-	7 Unit/ Paket	7 Unit/ Paket	100%
4 01 01 1.06 04	c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan/jenis Logistik Kantor yang disediakan (Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan)	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Paket	2 Paket	100%
4 01 01 1.06 05	d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan)	7 Jenis	7 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Paket	10 Paket	100%
4 01 01 1.06 06	e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah/Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
4 01 01 1.06 09	f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi (Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	24 Laporan	24 Laporan	100%
4 01 01 1.06 10	g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola (Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	-	-	-	-	-	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100%

Renja Biro Hukum Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
4 01 01 1.07 02	a Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-
4 01 01 1.07 05	b Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	4 Unit	16 Unit	-	-	-	-	-	-
4 01 01 1.07 06	c Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru (Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan)	7 Unit	11 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	9 unit	9 unit	100%
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
4 01 01 1.08 01	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun (Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat)	1000 surat	1000 surat	1000 surat	1000 surat	100,00%	1000 Laporan	1000 Laporan	100%
4 01 01 1.08 02	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan (Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan)	1 Rekening	1 Rekening	1 Rekening	1 Rekening	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4 01 01 1.08 04	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia (Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan)	-	-	-	-	-	1 org/ Laporan	1 org/ Laporan	100%

Renja Biro Hukum Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
4 01 01 1.09 01	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-
4 01 01 1.09 02	b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya)	4 Unit	4 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00%	10 unit	10 unit	100%
4 01 01 1.09 06	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara)	9 unit	9 unit	20 unit	20 unit	100,00%	20 unit	20 unit	100%

Renja Biro Hukum Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	90%	95,53%	90%	95,53%	106%	90%	90%	100%
4.01.05.1.0101	a Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Dokumen usulan propem perda dilingkungan pemerintah daerah, Jumlah Perda Provinsi, Jumlah Pergub Provinsi, Jumlah produk hukum daerah provinsi yang dievaluasi dan diklarifikasi oleh Pusat (Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun)	1 Dokumen; 10 Perda; 60 Pergub; 70 PHD Provinsi	1 Dokumen; 7 Perda; 39 Pergub; 46 PHD Provinsi	10 Perda; 40 Pergub	10 Perda; 40 Pergub	100,00%	65 Dokumen	65 Dokumen	100%
4.01.05.1.0102	b Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan (Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun)	750 Kepgub	1083 Kepgub	750 Kepgub	906 Kepgub	120,80%	800 Dokumen	800 Dokumen	100%
4.01.05.1.0103	c Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan melalui buku dan situs JDIH; Jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan melalui situs JDIH (Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya)	160 buku; 46 PHD Provinsi/ Tahun	160 buku; 46 PHD Provinsi/ Tahun	160 buku; 50 PHD Provinsi/ Tahun	80 buku; 15 PHD Provinsi/ Tahun	50,00%	160 Dokumen	160 Dokumen	100%
4.01.05.1.0104	d Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Draft/Rancangan produk hukum daerah Kab/Kota yang difasilitasi; Jumlah Perda kab/kota yang diklarifikasi; Jumlah Perkada/peraturan DPRD Kab/Kota yang diklarifikasi; Jumlah Ranperda kab/kota yang dievaluasi (Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi)	60 Draft PHD Kab/Kota; 3 Perda Kab/Kota; 5 Perkada/DPRD Kab/Kota; 20 Ranperda Kab/Kota	60 Draft PHD Kab/Kota; 0 Perda Kab/Kota; 2 Perkada/DPRD Kab/Kota; 25 Ranperda Kab/Kota	80 PHD Kab/Kota	112 PHD Kab/Kota	140,00%	80 Dokumen	80 Dokumen	100%

Renja Biro Hukum Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase penanganan perkara dan Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	90%	100%	90%	100%	111,11%	90%	90%	100%
4.01.05.1.0201	a Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah perkara yang ditangani (Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan)	10 Perkara	24 Perkara	10 Perkara	12 Perkara	120,00%	7 Kasus	7 Kasus	100%
4.01.05.1.0202	b Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah perkara masyarakat miskin yang diberi bantuan advokasi hukum; Jumlah permasalahan hukum non litigasi lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibahas; Jumlah unit kerja yang memenuhi indikator RANHAM (Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan)	5 Bantuan, 4 Permasalahan Hukum, 19 Kab/Kota	5 Bantuan, 4 Permasalahan Hukum, 19 Kab/Kota	8 Perkara; 19 Kab/Kota	8 Perkara; 19 Kab/Kota	100%	8 Kasus	8 Kasus	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah pada tahun lalu diperlukan sebagai tolok ukur untuk melakukan kajian dan analisis yang lebih mendalam terhadap target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan dukungan dana yang telah dialokasikan, serta mendukung peningkatan kinerja pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam konteks kinerja pelayanan tersebut, guna mendukung misi kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, maka penyusunan Renja Biro Hukum diarahkan pada upaya "Menurunnya Peraturan Perundangan-undangan yang tumpang tindih dan Disharmonis, Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM, dan Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani", dimana ketiga upaya tersebut menjadi tujuan yang harus dicapai oleh Biro Hukum pada tahun 2023, dan tahun-tahun perencanaan berikutnya. Untuk menetapkan indikator kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang dalam hal ini ditetapkan dengan penetapan Indikator Kinerja Daerah (perangkat daerah sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah, maka diperlukan data kajian terhadap pencapaian kinerja pelayanan dari tahun ke tahun beserta proyeksinya, sebagaimana terlampir pada tabel T-C.30 berikut :

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO HUKUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan		Persentase penyelesaian produk hukum daerah yang diselesaikan (diakomodir)	100	100	100	100	95,99%	100	100	100	
2	Persentase penanganan perkara yang diselesaikan		Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	120,00%	100	100	100	
3	Persentase bantuan hukum yang diselesaikan		Persentase penyelesaian bantuan hukum yang diselesaikan	100	100	100	100	100%	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Realisasi penggunaan dana di atas adalah realisasi dari segi keuangan, sedangkan secara fisik, semua program dan kegiatan hampir seluruhnya dapat dilaksanakan, namun diakui juga didalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala/hambatan dan permasalahan.

Sesuai dengan hasil analisa capaian kinerja tahun 2023 maka dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dituangkan berdasarkan program pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum, disertai langkah – langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan/masyarakat, sehingga dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, yang secara garis besar, dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) isu utama, yaitu :

2.3.1 Produk hukum provinsi yang dihasilkan belum sesuai target

- 2.3.2 Produk hukum daerah yang belum seluruhnya harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- 2.3.3 Masih kurangnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat dan pemerintah

Dari ketiga isu utama di atas, dapat diuraikan secara terinci, sebagai berikut :

a. Harmonisasi/sinkronisasi penyusunan produk hukum daerah

Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum yang lebih tinggi, produk hukum sederajat dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota diperlukan dalam rangka menjaga agar produk hukum daerah tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

b. Masih terdapatnya produk hukum daerah kabupaten/kota yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal menyusun produk hukum daerah pada dasarnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dalam pelaksanaannya masih ada produk hukum Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota dan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota.

c. Fasilitasi proses penelitian/koreksi produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum

Produk hukum daerah yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hal tersebut, produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga

materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tugas pokok Biro Hukum sebagai unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan. Implementasi dari tugas pokok tersebut adalah setiap konsep produk hukum daerah yang diusulkan oleh Perangkat Daerah/unit kerja pemrakarsa harus melalui proses pengkajian/penelitian yang dilakukan oleh Biro Hukum. Dengan demikian diharapkan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan/sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan, sehingga merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum dimaksud, masih ditemukannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) yang diajukan Perangkat Daerah/unit kerja pemrakarsa dilakukan secara tergesa-gesa ketika dilakukan proses pengkajian/penelitiannya pada Biro Hukum. Penetapan produk hukum daerah tersebut sering terjadi karena keterdesakan waktu perlunya produk hukum daerah tersebut segera ditetapkan. Hal ini membuka kemungkinan produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bukan merupakan kewenangan, sehingga anggota masyarakat yang merasa dirugikan dengan ditetapkannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan tersebut, dan masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum daerah antara Biro Hukum dengan Perangkat Daerah/unit kerja pemrakarsa produk hukum daerah.

d. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah/instansi vertikal pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Setiap Perangkat Daerah/unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. Perangkat

Daerah/unit kerja tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah yang akan diciptakannya. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah/unit kerja terkait. Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan secara efisien. Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah/unit kerja terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan produk hukum daerah, sedangkan pada saat ini banyak aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Kementerian teknis.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah/unit kerja di Provinsi. Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah sehingga Perangkat Daerah/unit kerja terkait tidak lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

e. Keterbatasan waktu dari Kabupaten/Kota yang menyampaikan produk hukum daerah untuk diregistrasi dan diklarifikasi.

Sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 242 yang menyatakan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi. Namun dalam pelaksanaannya, masih adanya Kab/Kota yang menyampaikan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda belum tepat waktu dan mendesak pada akhir tahun anggaran.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman oleh aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota terhadap perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping adanya keadaan yang mendesak untuk segera memberlakukan produk hukum daerah tersebut di Kabupaten/Kota.

f. Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam teknis penulisan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang akan menyusun produk hukum, karena prosedur penyusunan produk hukum telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Kurangnya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan dibentuk sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik di pusat maupun di daerah selayaknya disosialisasikan kepada aparatur pemerintah terutama aparatur Pemerintah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparatur Pemerintah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota disebabkan karena pada dasarnya aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan demikian sosialisasi setiap peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah provinsi kepada aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota sangat diperlukan.

Namun dengan adanya efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2017, terkait perubahan struktur organisasi pemerintah daerah yang baru, maka Biro Hukum mengalami pengurangan 1 (satu) bagian, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang dikurangi untuk menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Oleh karena itu Biro Hukum memiliki keterbatasan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan yang ada. Pada pelaksanaan Renja tahun 2020 dan 2021, Biro Hukum mengharapkan adanya peningkatan pendanaan untuk kegiatan yang ada dan baru agar penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.

h. Masih kurangnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat dan pemerintah.

Untuk meningkatkan pemahaman hak oleh masyarakat dan pemerintah, dalam rangka memberikan hak akses terhadap keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat dan pemerintah, maka perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah. Namun keterbatasan alokasi anggaran dan kompetensi SDM, masih menjadi kendala yang harus dihadapi, dan menghambat capaian kinerja bagi pemerintah daerah khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu terus-menerus diberikan pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan dalam beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara di pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

i. Terbantunya masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan.

Dalam peningkatan supremasi hukum terutama dalam pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu guna mewujudkan upaya penegakan hukum agar terwujudnya upaya pelayanan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Terbantunya masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara serta mendapat hak pembelaan kepentingan hukumnya di depan pengadilan. Biro Hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik berupaya melakukan program peningkatan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Bantuan Advokasi Hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi yang ada di Sumatera Barat. Dalam pendanaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara di pengadilan untuk itu perlu dukungan dana bagi kegiatan dimaksud.

Bantuan advokasi hukum tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan juga merupakan pengimplementasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

j. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas.

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan

koordinasi dengan instansi teknis dan instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban Pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM maupun penyelenggaraan hak dasar manusia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil terhadap masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025.

k. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta SDM terampil sebagai pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Pengoperasian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya SDM sebagai pengelola dan bertugas mengadministrasi JDIH. Di sisi lain, dalam pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana utama yang sedang dibangun dan dikembangkan pada tahun 2018 dalam pengelolaannya masih terbatas. Untuk itu Biro Hukum mengharapkan tersedianya SDM pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (SJDIH) yang terampil serta sarana yang kondusif, guna menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah dan nasional melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) yang terintegrasi dari daerah hingga ke pusat.

I. Keterbatasan dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait

Dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait, seringkali buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh instansi terkait tersebut tidak tersedia. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana dan fasilitas dokumentasi yang kurang memadai untuk melakukan pelayanan dokumentasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2023, yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023, maka review terhadap rancangan awal RKPD telah sesuai, namun dalam proses pelaksanaannya mengalami kendala-kendala, diantaranya rasionalisasi anggaran seluruh kegiatan yang belum prioritas untuk dilaksanakan, yang mengakibatkan anggaran kegiatan-kegiatan mengalami perubahan. Namun seiring perkembangan dan dinamika yang terjadi, beberapa kegiatan memerlukan penyesuaian anggaran untuk menunjang kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu dilakukan perubahan anggaran dengan penambahan/pergeseran dana, terutama pada belanja barang dan jasa serta belanja modal pada beberapa kegiatan Tata Usaha Biro, serta kegiatan yang bersifat urusan.

Usulan perubahan anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah disebutkan di atas, dikarenakan adanya pergeseran biaya pembahasan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten kota, biaya perjalanan dinas dalam rangka mendampingi DPRD Provinsi dalam kegiatan pembahasan produk hukum daerah, dan untuk mendukung kegiatan Biro Hukum lainnya, maka beberapa pergeseran/penambahan anggaran pada kegiatan belanja pokok dan kegiatan belanja urusan dilakukan untuk mengefektifkan serta mengoptimalkan daya serap anggaran khususnya pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Selain beberapa perubahan kegiatan di atas, maka kegiatan-kegiatan lainnya tetap dapat dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2023 tersebut.

Secara ringkas, data dapat dilihat pada lampiran tabel T-C.31 berikut :

TABEL T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
PROVINSI SUMATERA BARAT

NAMA SKPD : BIRO HUKUM

No.	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025)					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				3.435.370.000	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				3.435.370.000	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Sumbar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1.228.426.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	2.214.431.000	
4.01.01.1.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja	100%	60.000.000	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja	100%	63.000.000	
4.01.01.1.01.01	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	30.000.000	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	33.000.000	Penambahan anggaran pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk penyusunan revisi dokumen RENSTRA sesuai perodesisasi Kepala Daerah dalam perubahan RPJMD
4.01.01.1.01.06	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	20.000.000	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	20.000.000	
4.01.01.1.01.07	c Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	6 laporan	10.000.000	c Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	6 laporan	10.000.000	
4.01.01.1.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	85.000.000	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	102.352.000	
4 01 01 1.02 03	a Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 orang/ dokumen	80.000.000	a Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 orang/ dokumen	95.160.000	Perubahan pagu disesuaikan dengan Perpres tentang SHS terbaru, dan standar barjas
4 01 01 1.02 07	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun yang disiapkan	18 Laporan	5.000.000	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun yang disiapkan	18 Laporan	7.192.000	
4.01.01.1.03	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	24.600.000	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	21.663.500	
4 01 01 1.03 02	a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Unit/ Dokumen	15.600.000	a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Unit/ Dokumen	13.800.000	Prioritas kebutuhan yang sesuai dengan sub kegiatan
4 01 01 1.03 04	b Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	7.000.000	b Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	5.863.500	Prioritas kebutuhan yang sesuai dengan sub kegiatan
4 01 01 1.03 06	c Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	2.000.000	c Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	2.000.000	Tetap

Renja Biro Hukum Tahun 2025

No.	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025)					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.05	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	175.000.000	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	189.600.000	
4 01 01 1.05 09	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Sumbar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	175.000.000	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Sumbar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	189.600.000	Menyesuaikan standar harga barjas
4.01.01.1.06	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	572.536.000	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.685.773.320	
4 01 01 1.06 02	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Unit/ Paket	25.000.000	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Unit/ Paket	24.998.750	Menyesuaikan standar harga barjas
4 01 01 1.06 03	b Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Sumbar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Unit/ Paket	20.000.000	b Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Sumbar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Unit/ Paket	21.588.000	Menyesuaikan standar harga barjas
4 01 01 1.06 04	c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	25.000.000	c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	27.193.400	Menyesuaikan standar harga barjas
4 01 01 1.06 05	d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Sumbar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 paket	25.000.000	d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Sumbar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 paket	25.000.000	Menyesuaikan standar harga barjas
4 01 01 1.06 06	e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis/ Dokumen	25.000.000	e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis/ Dokumen	24.900.000	Menyesuaikan standar harga barjas
4 01 01 1.06 09	f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	450.536.000	f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	1.560.093.170	Bertambah (memindahkan perdin Luar Provinsi Dari Kegiatan Urusan Ke Kegiatan Rutin)
4 01 01 1.06 10	g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 dokumen	2.000.000	g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 dokumen	2.000.000	Tetap
4.01.01.1.07	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	50.000.000	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	67.742.180	
4 01 01 1.07 02	a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	67.742.180	Menyesuaikan standar harga barjas

Renja Biro Hukum Tahun 2025

No.	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025)					CATATAN PENTING		
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.01.01.1.08	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	166.000.000	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.000.000	
4 01 01 1.08 01	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	4.000.000	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	4.000.000	Menyesuaikan standar harga barjas
4 01 01 1.08 02	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 rekening/12 Laporan	2.000.000	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 rekening/12 Laporan	1.000.000	Menyesuaikan rincian belanja
4 01 01 1.08 04	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 org/12 Laporan	160.000.000	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					- Dialihkan, karena tidak diperkenankan perekrutan tenaga non ASN yang tugasnya tumpang tindih/teah ada di OPD lain
4.01.01.1.09	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	95.290.000	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	79.300.000	
4 01 01 1.09 02	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sumbar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	10 Unit	85.290.000	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sumbar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	10 Unit	69.490.000	Perubahan pagu disesuaikan dengan Kepgub tentang Pemutakhiran SHS terbaru (pengklasifikasian tahun randis)
4 01 01 1.09 06	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	10.000.000	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	9.870.000	
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Provinsi Sumbar	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	100%	2.206.944.000	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Provinsi Sumbar	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	100%	1.220.939.000	
4.01.05.1.01	9	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Provinsi Sumbar	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi	100%	1.385.000.000	9	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Provinsi Sumbar	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi	100%	753.588.000	
4.01.05.1.0101	a	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Provinsi Sumbar	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	65 Perda dan Pergub / Dokumen	610.000.000	a	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Provinsi Sumbar	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	65 Perda dan Pergub / Dokumen	370.057.000	Menyesuaikan rincian belanja perdin luar provinsi yang dialihkan ke sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, serta penyesuaian indikator berdasarkan propemperda dan propemperkada, dan rencana pengadaan kegiatan rakor penyusunan/ pembentukan produk hukum provinsi

Renja Biro Hukum Tahun 2025

No.	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025)					CATATAN PENTING	
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.01.05.1.0102	b	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Provinsi Sumbar	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	800 kepgub/ Dokumen	40.000.000	b	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Provinsi Sumbar	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	800 kepgub/ Dokumen	31.000.000	Menyesuaikan rincian belanja
4.01.05.1.0103	c	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	160 buku	160.000.000	c	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	160 buku	108.087.000	Menyesuaikan rincian belanja perdin luar provinsi yang dialihkan ke sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan rencana pengadaan kegiatan rakor JDIIH se-Sumbar
4.01.05.1.0104	d	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi Sumbar	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	80 rancangan PHD/Dokumen	575.000.000	d	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi Sumbar	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	80 rancangan PHD/Dokumen	304.450.000	Menyesuaikan rincian belanja perdin luar provinsi yang dialihkan ke sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan rencana pengadaan kegiatan rakor kabag hukum kab/kota se-Sumbar
4.01.05.1.02	10	Fasilitasi Bantuan Hukum	Provinsi Sumbar	Persentase bantuan hukum yang difasilitasi	100%	821.944.000	10	Fasilitasi Bantuan Hukum	Provinsi Sumbar	Persentase bantuan hukum yang difasilitasi	100%	467.351.000	
4.01.05.1.0201	a	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Provinsi Sumbar	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	7 perkara/ Kasus	656.944.000	a	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Provinsi Sumbar	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	7 perkara/ Kasus	352.194.000	Menyesuaikan rincian belanja perdin luar provinsi yang dialihkan ke sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan rencana pengadaan kegiatan rakor permasalahan hukum
4.01.05.1.0202	b	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Provinsi Sumbar	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	8 bantuan hukum/ Kasus	165.000.000	b	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Provinsi Sumbar	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	8 bantuan hukum/ Kasus	115.157.000	Menyesuaikan rincian belanja perdin luar provinsi yang dialihkan ke sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan rencana pengadaan kegiatan rakor RANHAM

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Seperti halnya telah disebutkan di atas, maka penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat juga telah sesuai dan tetap dilanjutkan pada tahun berjalan yaitu tahun 2024 dan juga rencana kerja tahun 2025, diantaranya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (berdasarkan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019), dan dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana keseluruhan program dan kegiatan itu menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan elemen-elemen masyarakat dan juga pemerintah. Dalam hal ini, tidak ada usulan Program dan Kegiatan yang bersumber dari masyarakat, baik program dan kegiatan lama maupun baru (nihil).

Dapat dilihat pada tabel T-C.32 berikut :

TABEL T.C 32 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 PROVINSI SUMATERA BARAT				
Nama OPD : Biro Hukum				
No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Sumbar		-
NIHIL				
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Provinsi Sumbar		-
NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJPD Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan Visi, Misi, Fungsi Tujuan serta strategi untuk mencapai keberhasilan pembangunan Sumatera Barat 2005-2025 harus mampu diterjemahkan dan mewarnai rencana strategis unit kerja dibawah koordinasi Pemerintah Daerah Sumatera Barat, termasuk Biro Hukum yang memiliki fungsi dan tugas menangani kegiatan yang menyangkut hukum dan HAM dalam upaya membangun dan memajemen penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Sebagai sebuah kesatuan, maka visi pembangunan Sumatera Barat tahun 2005-2025, yakni *"Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia Yang Agamis Pada Tahun 2025"*. Dalam konteks ini dengan tetap memperhatikan ketentuan Pemerintah Pusat terhadap kebijakan nasional, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, serta mendukung misi kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, maka penyusunan RENJA Biro Hukum Tahun 2025 diarahkan pada upaya *"Menurunnya Peraturan Perundangan-undangan yang tumpang tindih dan Disharmonis, Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM, dan Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani"*.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan yang menyangkut hukum dan HAM dititikberatkan pada upaya membangun dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean government serta meningkatkan pelayanan kepada sektor publik pada lingkup internal dan eksternal terhadap Perangkat Daerah provinsi, dan kabupaten/kota, serta masyarakat umum, pada aspek tertib administratif dan aspek teknis lainnya, guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman, kenyamanan serta kesatuan dan persatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelayanan dan langkah-langkah nyata terkait tugas pokok dan fungsi, maka tujuan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 yang berpedoman pada *casecading* Biro Hukum dan telah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah, yaitu :

1. Menurunnya Peraturan Perundangan-undangan yang tumpang tindih dan Disharmonis;
2. Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM; dan
3. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

Dengan sasaran Renja perangkat daerah, yaitu:

1. Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan;
2. Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan
4. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Menindaklanjuti kegiatan yang telah direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya, maka Biro Hukum merencanakan 2 program dengan 10 kegiatan serta 28 Sub Kegiatan pada tahun 2024, dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.2.400.000.000,-; dimana rumusan program sebelumnya sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatannya, sedangkan pagu indikatifnya disesuaikan dengan pagu anggaran pada Renja tahun 2024 (yang mengacu pada RPJMD dan RENSTRA) dan dirasionalisasi kembali sesuai hasil verifikasi dan evaluasi anggaran berdasarkan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan. Selanjutnya pada tahun 2025 (Renja Awal), Biro Hukum merencanakan :

- I. 2 (dua) program :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Program non urusan); dan
 2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Program Urusan).

- II. 10 (sepuluh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - 2.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
 - 3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 3.2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 3.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - 5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 5.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - 6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- 7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
9. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan :
 - 9.1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 - 9.2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
 - 9.3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya;
 - 9.4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota.
10. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum :
 - 10.1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum;
 - 10.2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.

dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 3.435.370.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**.
(data/matriks rincian secara lengkap disajikan pada tabel T-C.33).

Renja Biro Hukum Tahun 2025

TABEL T.C 33
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama OPD : Biro Hukum

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (Pagu Akhir)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (SESUAIKAN DENGAN RENSTRA 2021-2026)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH				3.435.470.000				3.439.929.000
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Provinsi Sumbar	100%	2.214.531.000	APBD	-	100%	1.127.269.000
4 01 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Provinsi Sumbar	100%	63.000.000	APBD		100%	70.000.000
4 01 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	9 Dokumen	33.000.000	APBD		8 Dokumen	30.000.000
4 01 01 1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sumbar	9 laporan	20.000.000	APBD		9 laporan	20.000.000
4 01 01 1 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Provinsi Sumbar	6 laporan	10.000.000	APBD		6 laporan	20.000.000
4 01 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Provinsi Sumbar	100%	102.352.000	APBD		100%	95.000.000
4 01 01 1 02 02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Sumbar	5 orang/ dokumen	95.160.000	APBD		5 orang/ dokumen	90.000.000
4 01 01 1 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun yang disiapkan	Provinsi Sumbar	18 Laporan	7.192.000	APBD		18 Laporan	5.000.000
4 01 01 1 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Provinsi Sumbar	100%	21.663.500	APBD		100%	24.600.000
4 01 01 1 03 04	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sumbar	3 Unit/ Dokumen	13.800.000	APBD		3 Unit/ Dokumen	15.600.000
4 01 01 1 03 05	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Sumbar	6 laporan	5.863.500	APBD		6 laporan	7.000.000
4 01 01 1 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Sumbar	8 Laporan	2.000.000	APBD		8 Laporan	2.000.000

Renja Biro Hukum Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (Pagu Akhir)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (SESUAIKAN DENGAN RENSTRA 2021-2026)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	100%	189.600.000	APBD		100%	185.000.000
4 01 01 1 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Sumbar	30 orang	189.600.000	APBD		30 orang	185.000.000
4 01 01 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	100%	1.685.873.320	APBD		100%	616.669.000
4 01 01 1 06 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Sumbar	5 Unit/ Paket	24.998.750	APBD		5 Unit/ Paket	30.000.000
4 01 01 1 06 02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Sumbar	5 Unit/ Paket	21.588.000	APBD		5 Unit/ Paket	30.000.000
4 01 01 1 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Provinsi Sumbar	2 paket	27.193.400	APBD		2 paket	30.000.000
4 01 01 1 06 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Provinsi Sumbar	10 paket	25.000.000	APBD		10 paket	30.000.000
4 01 01 1 06 02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Provinsi Sumbar	3 Jenis/ Dokumen	25.000.000	APBD		3 Jenis/ Dokumen	30.000.000
4 01 01 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sumbar	24 laporan	1.560.093.170	APBD		24 laporan	464.669.000
4 01 01 1 06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Sumbar	1000 dokumen	2.000.000	APBD		1000 dokumen	2.000.000
4 01 01 1 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Provinsi Sumbar	100%	67.742.180	APBD		100%	50.000.000
4 01 01 1 07 02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Sumbar	10 Unit	67.742.180	APBD		10 Unit	50.000.000
4 01 01 1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumbar	100%	5.000.000	APBD		100%	6.000.000
4 01 01 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumbar	1000 Laporan	4.000.000	APBD		1000 Laporan	4.000.000
4 01 01 1 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Sumbar	1 rekening/12 Laporan	1.000.000	APBD		1 rekening/12 Laporan	2.000.000
4 01 01 1 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Sumbar	-	-	APBD		-	-

Renja Biro Hukum Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (Pagu Akhir)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (SESUAIKAN DENGAN RENSTRA 2021-2026)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Provinsi Sumbar	100%	79.300.000	APBD		100%	80.000.000
4 01 01 1 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Sumbar	10 Unit	69.490.000	APBD		10 Unit	70.000.000
4 01 01 1 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Sumbar	20 unit	9.810.000	APBD		20 unit	10.000.000
4 01 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	Provinsi Sumbar	100%	1.220.939.000	APBD		100%	2.312.660.000
4 01 05 1 01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi	Provinsi Sumbar	100%	753.588.000	APBD		100%	1.455.716.000
4 01 05 1 01 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Provinsi Sumbar	65 Perda dan Pergub / Dokumen	310.051.000	APBD		65 Perda dan Pergub / Dokumen	610.000.000
4 01 05 1 01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Provinsi Sumbar	800 kepgub/ Dokumen	31.000.000	APBD		800 kepgub/ Dokumen	45.716.000
4 01 05 1 01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Provinsi Sumbar	160 buku	108.087.000	APBD		160 buku	200.000.000
4 01 05 1 01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Provinsi Sumbar	80 rancangan PHD/Dokumen	304.450.000	APBD		80 rancangan PHD/Dokumen	600.000.000
4 01 05 1 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase bantuan hukum yang difasilitasi	Provinsi Sumbar	100%	467.351.000	APBD		100%	856.944.000
4 01 05 1 02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Provinsi Sumbar	7 perkara/ Kasus	352.194.000	APBD		7 perkara/ Kasus	656.944.000
4 01 05 1 02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Provinsi Sumbar	8 bantuan hukum/ Kasus	115.157.000	APBD		8 bantuan hukum/ Kasus	200.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dimana rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Untuk rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah pada tahun 2025 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan telah disesuaikan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu dengan pagu anggaran awal sebesar **Rp. 3.435.370.000,-** dan prakiraan maju tahun 2026 sebesar **Rp. 3.439.929.000,-**.

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disampaikan pada tabel T-C.33, perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Program non urusan), dengan alokasi anggaran (sesuai RPJMD Tahun 2021-2026) dan pagu anggaran **telah** disesuaikan berdasarkan hasil verifikasi Renja Awal Tahun 2025, yang akan menjadi basis data Penetapan Renja Tahun 2025, maupun KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 nantinya. Rincian per Kegiatan dan Sub Kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 63.000.000,-** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi sebesar Rp.33.000.000, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah : 9 Dokumen

(Renja Awal/Akhir, Renja Perubahan, RKA SKPD, RKA Pergeseran/Perubahan SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Pergeseran/Perubahan SKPD, serta Revisi RENSTRA)

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, alokasi sebesar Rp. 20.000.000,-, dengan target kinerja berupa:

- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 9 Laporan
(LAKIP/SAKIP, LKPJ, LPPD, SBE, IKU/IKD, Renaksi, PK/RKT, SBDA, dan Metadata Statistik)

1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi sebesar Rp. 10.000.000, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun : 6 Dokumen
(Reviu Renja/Renja Perubahan, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA/RKAP, Reviu DPA/DPPA, Reviu PMPRB/RB, Reviu Maturitas SPIP/MR OPD)

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** sebesar **Rp.102.352.000,-** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :

2.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi sebesar Rp. 95.160.000,-, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD : 5 Orang/ Dokumen)

2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, alokasi sebesar Rp. 7.192.000,-, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun yang disiapkan : 18 Laporan

3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** sebesar **Rp. 21.663.500,-** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, alokasi sebesar Rp. 13.800.000, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD : 3 Unit/
Dokumen

3.2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, alokasi sebesar Rp. 5.863.500,-, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD : 6 Laporan

3.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, alokasi sebesar Rp. 2.000.000,-, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD : 8 Laporan

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar **Rp.189.600.000,-** terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, alokasi sebesar Rp. 189.600.000,-, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan : 30 Orang

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar **Rp. 1.685.873.320,-** terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan :

5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi sebesar Rp.24.998.750,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : 5 Unit/Paket

5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, alokasi sebesar Rp. 21.588.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan : 5 Unit/Paket

5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi sebesar Rp. 27.193.400,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan : 2 Jenis

5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi sebesar Rp.25.000.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan : 10 Jenis

5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, alokasi sebesar Rp. 25.000.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan : 3 Jenis/ Dokumen
- 5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi sebesar Rp.1.560.093.170,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD : 24 Dokumen
- 5.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, alokasi sebesar Rp. 2.000.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD : 1000 Arsip
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** sebesar **Rp. 67.742.180,-** terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :
- 6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi sebesar Rp. 67.742.180,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan : 10 Unit
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebesar **Rp. 5.000.000,-** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :
- 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi sebesar Rp. 4.000.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat : 1000 Laporan
- 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi sebesar Rp.1.000.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : 1 rekening/ 12 Laporan
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebesar **Rp. 79.300.000,-** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:
- 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi sebesar Rp.69.490.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya : 10 Unit
- 8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi sebesar Rp. 9.810.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara : 20 Unit

II. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum (Program Urusan), dengan alokasi anggaran sebesar : **Rp. 1.220.939.000,-** , dengan rincian per Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan** sebesar **Rp.753.588.000,-** terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan :

9.1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, alokasi sebesar Rp.310.051.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun Produk Hukum Pengaturan yang Disusun : 65 Perda dan Pergub/ Dokumen
(Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi penyusunannya : 15 Ranperda dan Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur yang difasilitasi penyusunannya : 50 Ranpergub)

9.2. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, alokasi sebesar Rp.31.000.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun : 800 Kepgub/ Dokumen
(Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur yang difasilitasi penyusunannya)

9.3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, alokasi sebesar Rp.108.087.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya : 160 Buku

9.4. Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, alokasi sebesar Rp.304.450.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi : 80 Rancangan PHD/ Dokumen

2. **Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum** sebesar **Rp. 467.351.000,-** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :

10.1. Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum, alokasi sebesar Rp. 352.194.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan : 7 perkara/ kasus

10.2. Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, alokasi sebesar Rp.115.157.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan : 8 bantuan hukum/ Kasus
(Jumlah bantuan advokasi hukum yang disalurkan : 8 Kasus)

4.2. Pendanaan

Terkait pendanaan rencana kerja yang telah dijelaskan pada angka 4.1. di atas, dapat dijelaskan secara terinci pada tabel berikut yang merupakan data Rekapitulasi Renja Tahun 2025 berdasarkan hasil entri pada aplikasi SIPD-RI :

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO HUKUM PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

Renja Biro Hukum Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO HUKUM						3.435.370.000,00							3.439.929.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						3.435.370.000,00							3.439.929.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						3.435.370.000,00							3.439.929.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</i>	100 %			100 %	2.214.431.000,00						100 %	1.127.269.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	63.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	70.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				9 Dokumen	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		30.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				9 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		20.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				6 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Sumatera Barat		20.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</i>	-			100 %	102.352.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	95.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				5 orang/ Dokumen	95.160.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		90.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	7.192.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		5.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</i>	-			100 %	21.663.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	24.600.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				3 unit/ Dokumen	13.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		15.600.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				6 Laporan	5.863.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		7.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				8 Laporan	2.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		2.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 %	189.600.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	185.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				30 Orang	189.600.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		185.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	1.685.773.320,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	616.669.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Unit/ Paket	24.998.750,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		30.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				5 Unit/ Paket	21.588.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		30.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	27.193.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		30.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				10 Paket	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		30.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Jenis/ Dokumen	24.900.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		30.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24 Laporan	1.560.093.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		464.669.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1000 Dokumen	2.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		2.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</i>	-			100 %	67.742.180,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	50.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10 Unit	67.742.180,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		50.000.000,00	BIRO HUKUM
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>													
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>													
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	5.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	6.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1000 Laporan	4.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		4.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 rekening/12 Laporan	1.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		2.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</i>	-			100 %	79.300.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	80.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	69.490.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		70.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	9.810.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		10.000.000,00	BIRO HUKUM
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	<i>Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum</i>	90 %			90 %	1.220.939.000,00						90 %	2.312.660.000,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	<i>Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi Persentase fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan</i>	-			100 % 90 %	753.588.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	-	1.455.716.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			<i>Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun</i>				65 perda dan pergub/ Dokumen	310.051.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat		610.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			<i>Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun</i>				800 kepgub/ Dokumen	31.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat		45.716.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			<i>Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya</i>				160 buku/ Dokumen	108.087.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat		200.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi</i>				80 rancangan PHD/ Dokumen	304.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat		600.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	<i>Persentase fasilitasi bantuan hukum Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi</i>	-			90 % 100 %	467.351.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	-	856.944.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			<i>Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan</i>				7 perkara/ Kasus	352.194.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat		656.944.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			<i>Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan</i>				8 bantuan hukum/ Kasus	115.157.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat		200.000.000,00	BIRO HUKUM
J U M L A H								3.435.370.000,00							3.439.929.000,00	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja tahun 2025 ini dibuat sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Biro Hukum yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga disesuaikan dengan dana anggaran yang nantinya dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, Renja tahun 2025 pada Biro Hukum juga disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi dari berbagai permasalahan/kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2023 dan proyeksi realisasi program/kegiatan pada tahun berjalan (2024), sehingga tugas dan fungsi Biro Hukum dapat diupayakan dan dilaksanakan untuk mencapai target secara optimal. Review ini dipaparkan sebagai evaluasi untuk memenuhi tuntutan dan harapan yang akan dihadapi oleh Biro Hukum nantinya, dengan beberapa catatan penting, yaitu :

1. Renja Biro Hukum Tahun 2025 merupakan komitmen perencanaan Biro Hukum dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun ke depan.
2. Renja Biro Hukum Tahun 2025 sebaiknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Biro Hukum pada tahun bersangkutan.
3. Renja Biro Hukum Tahun 2025 diharapkan dapat membuat kinerja pelayanan Biro Hukum menjadi lebih baik.
4. Penyesuaian alokasi pendanaan dibutuhkan bagi peningkatan kinerja pelayanan Biro Hukum kedepannya, mengikuti perkembangan zaman yang semakin dinamis sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Point-point yang telah dirumuskan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit kerja Biro Hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pendekatan rasionalisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum pada tahun anggaran 2025 yang akan datang sangat penting untuk dicermati dan dipedomani dalam menetapkan pagu anggaran tahun 2025, sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Demikian Rencana Kerja tahun 2025 ini disampaikan, untuk menjadi perhatian bagi semua pihak terkait.

Padang, Juni 2024

Kepala Biro Hukum,



Ezeddin Zain, S.H., M.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197410311998031004